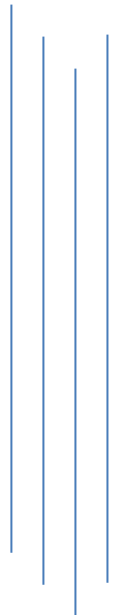




**RENCANA KERJA
BAPPELITBANGDA KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN 2025**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TARUTUNG
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jln. Letjend. S. Parman No. 1b Tarutung - Sumatera Utara
Telp. (0633) 21512 Fax. (0633) 20667

Website : <http://bappedalitbang.taputkab.go.id>; E-mail : bappedalitbang@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan diverifikasi mengacu kepada RKPD Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. bahwa untuk kepentingan dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020 – 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025**
- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagaimana pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2029 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Tapanuli Utara;
- KETIGA** : Sistematika Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, meliputi :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
 - Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 - Bab IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara
 - Bab V : Penutup
- KEEMPAT** : Rencana Kerja berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025.
- KELIMA** : Dalam rangka Pengendalian pelaksanaan rencana kerja, maka pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025;
 - Melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun yang akan datang;
 - Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja tahun yang akan datang.

- KEENAM** : Renja SKPD sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ini;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya atau membutuhkan penyesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung

Pada tanggal Januari 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
KEPALA,**



**LUHUT ARITONANG, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650821 198712 1 002**

Tembusan :

1. Bupati / Wakil Bupati Tapanuli Utara di Tarutung;
2. Sekretaris Daerah Kab. Tapanuli Utara di Tarutung;
3. Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KATA PENGANTAR

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Kami menyadari dokumen Renja Tahun 2025 ini disusun belum optimal. Harapannya dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya serapan anggaran yang rasional dan kinerja yang profesional. Melalui dokumen ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mencoba merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan untuk pembangunan yang berazaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tarutung, Januari 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
KEPALA,**



**LESTY ARITONANG, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA NIP.
196508211987121002**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.	ii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	24
3.3 Program dan Kegiatan.....	25
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	30
BAB. V PENUTUP.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tapanuli Utara. Dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025, sehingga dalam melakukan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran Perangkat Daerah karena kelembagaannya berubah maka sasaran Perangkat Daerahnya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomenklatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran Perangkat Daerah-nya. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara .

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuannya adalah :

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dengan Bupati Tapanuli Utara yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;
- 2) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 3) Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025.

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019- 2024;
 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang atas Peraturan Daerah Nomor

- 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 - 2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 - 2037;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024;
 19. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Bappelitbangda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang;

Memuat tentang pengertian Renja Bappelitbangda, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan Rencana

Strategis (Renstra).

1.2 Maksud dan Tujuan;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.3 Landasan Hukum;

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Bappelitbangda Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan;

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappelitbangda , serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Bappelitbangda dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Selain itu, juga untuk dapat diketahui

dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah tentang capaian program nasional/internasional, seperti SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasannya. Kemudian menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Renja, seperti terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya anggaran berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan. Deskripsi yang perlu disajikan pada subbab ini antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi

program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kebijakan kinerja kegiatan, program dan pengukuran kinerja sasaran yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan kedepannya akan lebih baik. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah. Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi

proses pengambilan kebijakan yang akan datang.

Anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 5.951.014.568,00, termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 4 (empat) program, dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar , - dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 95,02%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp 6.073.253.431 (belanja gaji dan tunjangan Rp 3.962.697.735) melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Total alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara T.A 2024 setelah perubahan anggaran sebesar Rp 5.453.613.576 yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian per Desember 2024 sebagai berikut :

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5	BELANJA DAERAH	5.453.613.576,00	5.111.531.949,00	93,73	5.951.014.568,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	5.453.613.576,00	5.111.531.949,00	93,73	5.696.521.746,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.962.697.735,00	3.713.055.864,00	93,70	3.459.187.827,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.490.915.841,00	1.398.476.085,00	93,79	2.237.333.919,00
5 . 2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	254.492.822,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	254.492.822,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.453.613.576,00	5.111.531.949,00		5.951.014.568,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				

Demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Bappelitbangda. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun

sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan tahun berjalan disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) s/d kondisi terakhir Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah		100%		100%	100%	100%	
5 1 1 201	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertelaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 Dokumen	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan		1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	50
5 1 1 201 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tertelaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja		1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Perubahan Renja	50
5 1 1 201 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tertelaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen Lakip		1 Dokumen Lakip	1 Dokumen Lakip	1 Dokumen Lakip	50
5 1 1 201 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertelaksananya penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	60 Laporan Bulanan	12 laporan bulanan		12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	50
5 1 1 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertelaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah		12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan		12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	50
5 1 1 202 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	60 Bulan	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN		12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	50
5 1 1 202 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertelaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	50
5 1 1 202 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tertelaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen laporan keuangan		1 Dokumen laporan keuangan	1 Dokumen laporan keuangan	1 Dokumen laporan keuangan	50
5 1 1 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2 orang / nama diklat	2 orang / nama diklat	2 orang / nama diklat	
5 1 1 205 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertelaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	10 Orang	2 orang / nama diklat		2 orang / nama diklat	2 orang / nama diklat	2 orang / nama diklat	50
5 1 1 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		10 jenis komponen listrik, 10 jenis perlengkapan kantor, 10 jenis peralatan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5 1 1 206 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5 1 1 206 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5 1 1 206 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5 1 1 206 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5 1 1 206 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5 1 1 206 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertelaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5 1 1 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertelaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4 PC,5 Printer	4 PC,5 Printer	4 PC,5 Printer	50
5 1 1 207 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertelaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 PC,5 Printer	4 PC,5 Printer		4 PC,5 Printer	4 PC,5 Printer	4 PC,5 Printer	50
5 1 1 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN		12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	

5	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta 1 unit bangunan kantor	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta 1 unit bangunan kantor		9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta 1 unit bangunan kantor	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta 1 unit bangunan kantor	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta 1 unit bangunan kantor	50
5	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	50
5	1	1	209	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	60 Bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	»
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan		Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKPD dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD		Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKPD dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD	Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKPD dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD	Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKPD dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD	
5	1	2	201		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							
5	1	2	201	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya pelaksanaan konsultasi publik	5 Dokumen	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara		Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	»
5	1	2	201	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya pelaksanaan forum SKPD	10 Dokumen	Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara		Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	»
5	1	2	201	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelaksanaan Musrenbang	10 Dokumen	Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara		Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	»
5	1	2	201	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	10 Dokumen	Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD		Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD	Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD	Dokumen RKPD 2022, Perubahan RKPD 2021 dan Perubahan RPJMD	»
5	1	2	203		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
5	1	2	203	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan		2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	»
5	1	2	203	3	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	20 Laporan	1 Laporan per triwulan		1 Laporan per triwulan	1 Laporan per triwulan	1 Laporan per triwulan	»
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan program RPJMD, RENSTRA dan RKPD							
5	1	3	201		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	60 Dokumen	25 Dokumen		8 Dokumen dan 4 Laporan	8 Dokumen dan 4 Laporan	8 Dokumen dan 4 Laporan	»
5	1	3	201	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60 Dokumen	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	»
5	1	3	201	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60 Dokumen	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	»
5	1	3	201	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	60 Dokumen	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	»
5	1	3	201	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60 Dokumen	5 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	»
5	1	3	201	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60 Dokumen	5 Dokumen		3 Dokumen, 2 Laporan	3 Dokumen, 2 Laporan	3 Dokumen, 2 Laporan	»
5	1	3	201	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60 Dokumen	5 Dokumen		2 Laporan Moveva	2 Laporan Moveva	2 Laporan Moveva	»

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur, kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014- 2019 dan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024. Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan.

1. Tugas dan Fungsi Bappeda

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) Koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Bappelitbangda berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara No 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Sarana, Wilayah dan Tata Ruang;
- d. Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah;
- e. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Sosial;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Pencapaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3
1	Nilai AKIP Bapplitbangda Kabupaten Tapanuli Utara			70,73	71	71,50	71,80	70,73	-	71,50	71,80	
2	Indeks Perencanaan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

3	Kinerja Pembangunan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan			90%	90%	90%	90%	100%	-	90%	90%	

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tapanuli Utara selaku lembaga teknis di bidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Berangkat dari fenomena tersebut Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tapanuli Utara adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksana tugas teknis perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis perencanaan, dan pembinaan dibidang perencanaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara didukung dengan potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan di daerah;
2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan pusat dan daerah;
3. Terbatasnya ketersediaan data secara terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
4. Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi perencana;
5. Belum optimalnya sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan pada pemerintah daerah;
7. Belum tersedianya fungsional peneliti; dan
8. Belum terbangunnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan, Pasal 2 ayat (2) menyatakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Review terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Rancangan awal RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan. Program dan Kegiatan yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tapanuli Utara tidak mengalami yang signifikan dan telah sesuai dengan Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2019-2024, namun ada terhadap besarnya pagu indikatif atau besarnya jumlah anggaran yang diusulkan untuk membiayai rencana kegiatan.

Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019–2024. Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2025 Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara

No	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/ KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	PERENCANAAN					PERENCANAAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah		6.070.380.593	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah		6.070.380.593	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.054.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	14.054.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappelitbangda	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	3.040.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bappelitbangda	Tertaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja	3.040.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappelitbangda	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	2.004.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bappelitbangda	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Lakip	2.004.700	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappelitbangda	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	9.009.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bappelitbangda	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan bulanan	9.009.800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.273.025.623	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	4.273.025.623	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappelitbangda	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	4.217.762.223	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappelitbangda	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	4.217.762.223	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappelitbangda	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	53.263.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bappelitbangda	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	53.263.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang valid dan memadai	12	2.000.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang valid dan memadai	1 Dokumen laporan keuangan	2.000.200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				197.670.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10 jenis komponen listrik, 10 jenis perlengkapan kantor, 10 jenis peralatan RT	197.670.300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappelitbangda	Jumlah Jenis komponen listrik/penerangan	12	5.009.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappelitbangda	Jumlah Jenis komponen listrik/penerangan	10 jenis komponen listrik	5.009.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappelitbangda	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	18.049.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappelitbangda	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis perlengkapan kantor	18.049.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappelitbangda	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	2.886.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappelitbangda	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	10 jenis peralatan RT	2.886.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappelitbangda	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	24.304.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bappelitbangda	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	24.304.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappelitbangda	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	3.048.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappelitbangda	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	3.048.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	12	144.373.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	12 bulan	144.373.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				221.606.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	221.606.300	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappelitbangda	jumlah Paket/Surat terkirim	12 bulan	2.088.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bappelitbangda	jumlah Paket/Surat terkirim	12 bulan	2.088.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappelitbangda	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	50.107.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappelitbangda	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	50.107.100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappelitbangda	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	169.411.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappelitbangda	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	169.411.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81.461.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81.461.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappelitbangda	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	12 bulan	36.769.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappelitbangda	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	12 bulan	36.769.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappelitbangda	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	12 bulan	4.964.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappelitbangda	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	12 bulan	4.964.900	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappelitbangda	Penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan	39.726.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bappelitbangda	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	12 bulan	39.726.900	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				937.664.150	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				937.664.150	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				724.464.150	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				724.464.150	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota yang dihasilkan	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	48.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota yang dihasilkan	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	48.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	24.999.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	24.999.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	150.065.150	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	150.065.150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen RKPD 2023, RKPD 2021 dan RPJMD	501.400.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen RKPD 2023, RKPD 2021 dan RPJMD	501.400.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				167.600.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				167.600.000	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 Dok	137.600.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	137.600.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dok	30.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Laporan per triwulan	30.000.000	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				45.600.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				45.600.000	
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembngnan Daerah	Bappelitbangda	Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembngnan Daerah	12 Bulan	45.600.000	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembngnan Daerah	Bappelitbangda	Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembngnan Daerah	12 Bulan	45.600.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				370.000.020	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				370.000.020	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase data dan Informasi perencanaan program Pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan		150.000.020	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase data dan Informasi perencanaan program Pembangunan Sosial Budaya yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan		150.000.020	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	8.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	8.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	14.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	14.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	8.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Bappelitbangda	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	8.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	30.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	30.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Dokumen, 2 Laporan	80.000.020	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Dokumen, 2 Laporan	80.000.020	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan Moneva	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappelitbangda	Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan Moneva	10.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Fasilitas dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dilaksanakan		120.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Fasilitas dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang dilaksanakan		120.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	10 Dokumen	70.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	10 Dokumen	70.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	10 Dokumen	32.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	10 Dokumen	32.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	3 Laporan	18.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Bappelitbangda	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan.	3 Laporan	18.000.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				100.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			12 dokumen perencanaan OPD + 10 dokumen Proposal / Usulan PD + 6 Laporan Moneva	100.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tertaksananya Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		30.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tertaksananya Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 dokumen renja OPD (PUPR, Perkim, Perhubungan)	30.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappelitbangda	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		15.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappelitbangda	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7 dokumen	15.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappelitbangda	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		10.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Bappelitbangda	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan Moneva PD	10.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		30.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappelitbangda	Tertaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 dokumen renja OPD (Lindup, Pariwisata, BPBD)	30.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda	Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		15.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Bappelitbangda	Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 dokumen PD	15.000.000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				50.000.000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				50.000.000	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Prosentase hasil Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan		50.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Prosentase hasil Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan		50.000.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Bappelitbangda	Dokumen Laporan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		50.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bappelitbangda	Dokumen Laporan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Nilai IGA : 301-500	50.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat										

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik Kelompok Masyarakat terkait dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi- asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

**Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Dari
Pemangku Kepentingan Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Penyusunan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, sasaran RPJMN, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Penyusunan RKP juga mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, sekaligus menjadi window opportunity untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk

menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan Non-State Actor untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan” dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

1. SDM Berkualitas, dengan sasaran SDM berdaya saing dan produktif

Transformasi Sosial :

- Penetapan wajib belajar 13 tahun;
 - Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan;
 - Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting;
 - Penetapan penggunaan regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif;
 - Penetapan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;
 - Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system
- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
- Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa.

2. Infrastruktur Berkualitas, dengan sasaran infrastruktur untuk peningkatan produktifitas

Transformasi Ekonomi :

- Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- Penguatan infrastruktur digital;
- Pengembangan infrastruktur transisi energi;
- Percepatan infrastruktur IKN;

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi :

- Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan.

Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan :

- Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- Pengembangan skema graduasi bansos;
- Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
- Peningkatan ketrampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
- Peningkatan partisipasi sosial, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
- Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
- Peningkatan produksi industri olahan;
- Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;
- Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi.

Berdasarkan lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, secara rinci sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang yaitu UU

cipta lapangan kerja dan UU pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritas investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi. Lebih dari itu, perumusan tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Berikut tujuan jangka menengah berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan”

Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara. Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja

sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan, berikut sasaran jangka menengah berdasarkan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Kinerja Pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Daerah.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2029;
2. Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan Sustainable Development Goal's (SDG's), dimana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang terintegrasi ke dalam dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam Renja tahun 2025 ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara merencanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan jumlah total pagu indikatif sebesar Rp. 6.070.380.593,-. Dengan lokasi

kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara kecuali untuk kegiatan perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan di luar daerah. Dari total pagu indikatif tersebut, seluruhnya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025. Berikut disajikan pada tabel 3.1 rumusan rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sebagai berikut :

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NO Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	TARGET		Pagu		Alasan
					Semula	Menjadi		Renja 2025	Renja 2026	Renja 2025	Perkiraan Renja 2026	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	1		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran tugas dan fungsi Perangkat daerah	100%	100%	6.070.380.593		P-APBD
5	1	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja, 1 Dokumen Lakip, 12 laporan bulanan	4.762.716.423		P-APBD
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tertaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja	1 Dokumen Renstra dan 1 dokumen Renja, 1 dok Renja	14.054.500		P-APBD
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tertaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Lakip	1 Dokumen Lakip	3.040.000		P-APBD
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan bulanan	12 laporan bulanan	2.004.700		P-APBD
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	12 bulan gaji dan tunjangan ASN, 1 laporan keuangan	4.273.025.623		P-APBD
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan Gaji dan tunjangan ASN	4.217.762.223		P-APBD
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	53.263.200		P-APBD
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tertaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen laporan keuangan	1 Dokumen laporan keuangan	2.000.200		P-APBD
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 jenis kompone n listrik, 10 jenis perlengkapan kantor, 10 jenis peralatan RT	12 bulan	197.670.300		
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	5.009.600		P-APBD

1					2		3	4	5	6	7	8	9
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	18.049.000		P-APBD
5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralataan Rumah Tangga		Penyediaan Peralataan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	2.886.000		P-APBD
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	24.304.200		P-APBD
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	3.048.000		P-APBD
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	144.373.500		P-APBD
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	12 bulan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik dan Gaji Non ASN	221.606.300		P-APBD
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	2.088.000		P-APBD
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	50.107.100		P-APBD
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	169.411.200		P-APBD
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta serta 1 unit bangunan kantor	9 sepeda motor, 1 mobil, peralatan dan mesin serta serta 1 unit bangunan kantor	81.461.600		
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	36.769.800		P-APBD
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	12 bulan	4.964.900		P-APBD
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor	12 bulan	12 bulan	39.726.900		P-APBD

1					2		3	4	5	6	7	8	9
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Wilayah	Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKP dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD RPJMD	Dokumen Ranwal, RKPD dan Berita Acara, Rancangan RKP dan Berita Acara, Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara dan Dokumen RKPD RPJMD	937.664.150		
5	1	2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			724.464.150		
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya pelaksanaan konsultasi publik	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Awal dan Berita Acara	48.000.000		P-APBD
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya pelaksanaan forum SKPD	Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan RKPD dan Berita Acara	24.999.000		P-APBD
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelaksanaan Musrenbang	Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	Dokumen Rancangan Akhir RKPD dan Berita Acara	150.065.150		P-APBD
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten	Dokumen RKPD dan RPJMD	Dokumen RKPD dan RPJMD	501.400.000		P-APBD
5	1	2	2.03		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			167.600.000		
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	2 dokumen proposal, 4 laporan triwulan	137.600.000		P-APBD
5	1	2	2.03	3	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	1 Laporan per triwulan	1 Laporan per triwulan	30.000.000		P-APBD
5	1	2	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	45.600.000		
5	1	2	2.04	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	45.600.000		
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan program RPJMD, RENSTRA dan RKPD			370.000.000		
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	25 Dokumen	8 Dokumen dan 4 Laporan	150.000.020		
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000		P-APBD
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000		P-APBD
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000		P-APBD

1					2					3					4					5					6					7					8					9				
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					5 Dokumen					2 Dokumen					30.000.000					P-APBD									
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					5 Dokumen					3 Dokumen, 2 Laporan					80.000.020					P-APBD									
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					5 Dokumen					2 Laporan Moneva					10.000.000					P-APBD									
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					20 Dokumen dan 3 Laporan					20 Dokumen dan 3 Laporan					120.000.000														
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					10 Dokumen					5 Dokumen					70.000.000					P-APBD									
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					10 Dokumen					10 Dokumen					32.000.000					P-APBD									
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					3 Laporan					3 Laporan					18.000.000					P-APBD									
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					12 dokumen perencanaan OPD + 10 dokumen Proposal /Usulan PD + 6 laporan Moneva					12 dokumen perencanaan OPD + 10 dokumen Proposal /Usulan PD + 6 laporan Moneva					100.000.000														
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					6 dokumen renja OPD (PUPR, Perkim, Perhubungan)					6 dokumen renja OPD (PUPR, Perkim, Perhubungan)					30.000.000					P-APBD									
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					7 dokumen					7 dokumen					15.000.000					P-APBD									
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					3 Laporan Moneva PD					3 Laporan Moneva PD					10.000.000					P-APBD									
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					6 dokumen renja OPD (Lindup, Pariwisata, BPBD)					6 dokumen renja OPD (Lindup, Pariwisata, BPBD)					30.000.000					P-APBD									
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					3 dokumen PD					3 dokumen PD					15.000.000					P-APBD									
5	5				Penelitian dan Pengembangan					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																				50.000.000														
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan															50.000.000														
5	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi					Pengembangan Inovasi dan Teknologi					Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi															50.000.000														
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersifat Inovatif					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif					Terlaksananya diseminasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif melalui penilaian IGA					Nilai IGA : 301-500					Nilai IGA : 301-500					50.000.000					P-APBD									

TABEL 3.2
REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM / KEGIATAN & PAGU RKPD 2024

Kode						URUSAN	JUNJAH PROGRAM				JUNJAH KEGIATAN				JUNJAH SUB KEGIATAN				JUNJAH PAGU				Jumlah Pagu Baru	Jumlah Kegiatan/Sub Kegiatan Baru
							Renja 2025	APBD 2025	PENYEMPURNAAN APBD 2025	PERUBAHAN RENJA 2023	Renja 2025	APBD 2025	PENYEMPURNAAN APBD 2025	RENJA 2023	Renja 2025	APBD 2025	PENYEMPURNAAN APBD 2025	RENJA 2023	Renja 2025	APBD 2025	PENYEMPURNAAN APBD 2025	RENJA 2023		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5						URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3	3	3	3	11	11	11	11	42	42	42	42	6.145.482.493	6.145.482.493	6.145.482.493	6.412.468.991	6.145.482.493	0
5	5					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	50.000.000	50.000.000	50.000.000	312.351.500	50.000.000	0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, pagu anggaran dan sumber dana yang disertai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara merencanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan.

Baik program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 :

1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota;
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

4) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

1. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur;
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan;

3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa.

2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

1. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dengan total alokasi anggaran Rp. 6.145.482.493,- yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, Januari 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA**
KEPALA,



LUHUT ARITONANG, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196508211987121002